



Giliran Pemkot Data Sultan Ground

YOGYAKARTA – Giliran Pemkot Yogyakarta kedapatan tugas menginventarisir aset Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) di wilayah hukumnya. Untuk keperluan tersebut, Pemkot digelontor Dana Keistimewaan (Danais) Rp200 juta.

Sebelumnya Pemkab Gunungkidul yang mendapatkan tugas mendata tanah-tanah milik Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Penugasan dari Pemda DIY itu sempat menimbulkan polemik antara DPRD Gunungkidul dan Pemkab.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hary Setyawana mengatakan, keterlibatan Pemkot dalam pendataan SG dan PAG baru dimulai tahun ini. Peran Pemkot pun hanya menindaklanjuti data yang nantinya disodorkan oleh Pemda DIY.

"Data yang sudah kami pegang baru ada sekitar 60 bidang. Sekarang sedang kami klasifikasi dulu untuk menentukan prioritas. Target kami 50 bidang dulu dengan anggaran Danais Rp200 juta," tutur Hary kemarin.

Bidang SG dan PAG yang di-

prioritaskan dalam sertifikasi tahun ini adalah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Terutama area pemukiman yang dikelola wilayah, maupun lahan di atasnya terbangun area publik. Ini akan jadi fokus Pemkot.

Ke Hal 14

Giliran Pemkot Data Sultan Ground

(Dari Hal 13

Data dari Pemda DIY hasil pendataan 2015, tercatat ada 58.219.146 meter persegi, baik SG maupun PAG yang terbagi dalam 13.226 bidang. Total lahan tersebut juga tersebar di wilayah DIY. Ditargetkan, seluruh SG dan PAG itu dapat disertifikasi pada 2024 mendatang.

Hary berharap masyarakat yang menempati SG maupun

PAG tidak perlu khawatir terkait pendataan tersebut. Sebab setelah pendataan masyarakat justru akan memiliki bukti legalitas yang semakin jelas terhadap lahan yang ditempati.

Apalagi Pemkot juga akan sekaligus memfasilitasi bidang tanah yang berstatus SG maupun PAG untuk proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta.

"Setelah didata, kami ajukan ke BPN. Kemudian ketika sertifikat terbit, kami berikan ke Keraton atau Kadipaten termasuk memintakan surat kekancingan untuk kami berikan ke pengelola atau pemanfaat supaya aspek legalitasnya terjaga," janji Hary.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti mendukung

langkah Pemkot yang akan mendata SG dan PAG. Dia juga berharap masyarakat tidak khawatir akan adanya pengusuran atau penarikan lahan oleh pihak Keraton maupun Kadipaten.

"Jika sudah terdata, maka akan tersertifikasi dan memperoleh kekancingan. Artinya legalitas masyarakat penghuni lahan SG/PAG lebih jelas lagi

dibanding sebelum ada sertifikasi," ujarnya.

Selain itu, dengan proses pendataan yang berujung sertifikasi nantinya juga lebih memperjelas bidang-bidang tanah mana saja yang tergolong SG, PAG, milik negara, atau persil pribadi. Terlebih beberapa waktu lalu terjadi kasus saling klaim kepemilikan lahan.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005